

**KONFLIK PALESTINA - ISRAEL :
POTENSI INDONESIA DALAM RESOLUSI KONFLIK**



Oleh : Suryo Wibisono

PADA HARI RABU 26 SEPTEMBER 2007
DISAMPAIKAN DALAM DISKUSI YANG BERTEMPAT DI LAB. HANKAM

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Konflik Mutakhir Internal Palestina

Pemerintahan baru Palestina di bawah kelompok radikal Hamas sudah terbentuk. Negara Barat mengancam menghentikan bantuan keuangan. Israel kini sangat membatasi kebebasan bergerak maupun kekuasaan Hamas. Israel juga mengancam, jika Hamas tidak menghentikan aksi teror, mereka akan diisolasi secara politik. Bagi Hamas ini berita buruk. Akan tetapi bagi kawasan bersangkutan, inilah pilihan yang cukup baik, ketimbang membiarkan sebuah organisasi teror bebas berkeliaran. Janji bantuan keuangan dari negara-negara Arab, akan sulit ditepati. Buktinya, selama puluhan tahun kekesengsaraan terus melanda kawasan pengungsi di Palestina, akibat tidak diwujudkannya janji bantuan dari saudara seagama, sebagai contoh, pendapatan Arab Saudi setiap bulan lebih dari 6 milyar Dollar AS, namun bantuan Saudi terhadap masyarakat Palestina hanya sebesar kurang dari 200 juta Dollar AS. Pada sidang parlemen pertamanya, PM Ismail Haniya membunyikan tanda bahaya. Hamas secara politik diisolasi. Dan sekaligus berada di bawah tekanan negara Barat, yang mengancam akan menghentikan bantuannya. Ditambah dengan sikap Israel, menahan uang pajak dan bea yang menjadi hak Palestina, pemerintahan di bawah Haniya praktis berada di ambang kebangkrutan.

Pejabat-pejabat Palestina mengatakan Amerika bersama negara Barat lain menekan bank-bank internasional dan regional agar tidak mentransfer dana kepada pemerintah Palestina yang didominasi Hamas. Nabil Amr, penasehat utama Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa dana yang dijanjikan oleh berbagai pemerintah di Timur Tengah tidak dapat disalurkan kepada Otoritas Palestina. Ia menuduh Washington telah memperingatkan berbagai bank agar tidak berurusan dengan Hamas yang dianggap Washington organisasi teroris.

Kwartet Timur Tengah yang terdiri atas Amerika, Uni Eropa, Rusia dan PBB telah menyatakan tidak akan berurusan dengan pemerintah baru Palestina kecuali jika Hamas membuang kekerasan, menerima perjanjian perdamaian yang lalu dan mengakui hak Israel untuk berdiri. Hamas yang telah bersumpah hendak menghancurkan Israel sampai sekarang menolak semua tuntutan agar memodifikasi posisinya dan merundingkan perdamaian dengan Israel. ¹

¹ Dikutip dari NewsVOA.com

Selain hal di atas sebenarnya sejak kemenangan Hamas pada pemilu Januari 2006 pihak asing yang tidak ikhlas dengan kemenangan Hamas telah melakukan berbagai cara untuk melakukan tekanan-tekanan kepada Hamas dan usaha-usaha untuk menggulingkan Pemerintahan Hamas, usaha tersebut antara lain:

- a. Isolasi politik dan ekonomi
- b. Pembekuan pajak
- c. Penguatan sepihak terhadap Fatah

Hamas menyatakan bahwa usaha untuk mengusir Israel dari Palestina tidak akan terwujud apabila selalu diwarnai dengan adanya perang saudara diantara mereka yang tidak lain adalah Hamas dan Fatah. Hamas berupaya mengajak Fatah untuk berdamai dan bersatu untuk menghadapi musuh yang sebenarnya yaitu Israel akan tetapi di saat perdamaian baru akan terwujud diantara mereka masih juga terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam Fatah untuk menggulingkan pemerintahan Hamas. Konflik dan peperangan yang terjadi diantara mereka merupakan hasil dari usaha jahat yang dilakukan oleh beberapa pimpinan Fatah yang dengan sengaja memang ingin menggulingkan pemerintahan Hamas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha pembunuhan atas perdana menteri Palestina yaitu Ismail Haniyyah yang ketika itu sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan resmi yang pertama ke luar negeri pada bulan Februari yang lalu, tetapi usaha pembunuhan itu dapat dipatahkan oleh pejuang Hamas.

Walaupun ketegangan sempat mereda pasca terbentuknya pemerintahan persatuan pasca kesepakatan Makkah, namun pada pertengahan Juli 2007 perpecahan yang lebih besar kembali muncul.

Akhirnya pertikaian antar faksi di Palestina berakhir tragis. Wilayah yang hingga kini masih berstatus sebagai daerah pendudukan Israel harus terpecah dua lagi. Jalur Gaza dikuasai Hamas, sedangkan Tepi Barat dikuasai Fatah.

Namun kedua pihak tetap menyatakan diri sebagai pemerintah sah di dua wilayah itu. Hal ini merupakan salah satu klimaks pertikaian Hamas–Fatah yang berlangsung sejak tahun 2006 ketika Hamas menang dalam pemilu.

Awalnya pertikaian hanya terjadi di beberapa titik, namun kemudian pertikaian meluas diseluruh Jalur Gaza dan meningkat ke dalam tahap perebutan

markas. Perdana Menteri (PM) Ismail Haniya mengatakan, perebutan kekuasaan dilakukan karena Fatah merupakan *infidels* (pengkhianat Islam) serta antek Israel dan Amerika Serikat (AS).

Aksi Hamas baru-baru ini di Jalur Gaza hanya bertujuan untuk membersihkan sekelompok kecil pengacau dari faksi Fatah yang berasal dari pejabat dan perwira keamanan loyalis Mohamad Dahlan.

Hamas tidak pernah ingin mendongkel kekuasaan Presiden Mahmoud Abbas yang terpilih secara demokratis. Sebaliknya Hamas tetap mengakui dan ingin membuka dialog dengan Abbas untuk mengembalikan situasi Palestina seperti semula, dan keinginan tersebut telah berkali-kali diungkapkan Hamas melalui PM. Ismail Haniya maupun Khaleed Meshal di Suriah.

Ketua Komisi Hukum di Parlemen Palestina yang berasal dari Hamas, Mohammed FM EL Goul menegaskan hal tersebut bahwa sekelompok kecil pengacau itu yang menguasai dan jabatan penting di lembaga keamanan telah membunuh dan menyiksa anggota dan simpatisan Hamas. Mereka menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan persatuan hasil kesepakatan Mekkah. Mereka telah menghambat pelaksanaan kesepakatan Mekkah dengan cara memisahkan diri dari aparat keamanan pemerintahan persatuan pimpinan PM. Ismail Haniya. Mereka membuat sistem komando sendiri yang terpisah dari pemerintahan Ismail Haniya, bahkan mereka melakukan anarkisme keamanan untuk menggoyang pemerintahan Ismail Haniya.

El Goul menuduh pula bahwa kelompok tersebut telah terlibat konspirasi dengan AS dan Israel untuk menjatuhkan pemerintahan Ismail Haniya. Banyak bukti-bukti konspirasi tersebut, antara lain ketika Saeb Erekat (Ketua Juru Runding Palestina) dalam dialog dengan Hamas selalu mengatakan bahwa AS tidak mau Hamas berkuasa, baik berkuasa sendiri maupun berkoalisi, padahal Hamas menang secara demokratis dan mutlak dalam pemilu Januari 2006. Artinya, AS dan Israel tentu saja akan berusaha dengan segala cara untuk menjatuhkan pemerintahan Ismail Haniya. Meskipun demikian, aksi Hamas di Jalur Gaza bukanlah balas dendam atau perebutan kekuasaan dan tidak pernah ada niat dari Hamas mendeklarasikan Negara atau wilayah eksklusif Jalur Gaza, Hamas tetap mengakui Mahmoud Abbas sebagai Presiden Palestina untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Khaleed Meshal dan Ismail Haniya telah berkali-kali

menegaskan bahwa Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²

Sementara itu Presiden Palestina dari Fatah Mahmoud Abbas berniat menggelar pemilu dini untuk memperkuat posisi. Namun pemilu tersebut tampaknya hanya bisa terselenggara di Tepi Barat, sebab Hamas yang kini menguasai Jalur Gaza bertekad akan mengacaukan pemilu tersebut.

Penasehat Abbas, Yasser Abed Rabbo, mengatakan para pemimpin Palestina akan berupaya melaksanakan pemilu legislatif dan Presiden di Tepi Barat dan Jalur Gaza secara proporsional. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendesak Abbas untuk menggelar pemilu dini. Sebanyak 115 anggota dewan pusat PLO dalam pernyataan akhir menyebutkan, Abbas selaku pimpinan PLO harus mengamankan kondisi Palestina untuk menggelar pemilu presiden dan parlemen sesegera mungkin. Rencana PLO dan Abbas tersebut langsung ditolak Hamas, Hamas mengatakan langkah tersebut merupakan perampokan atas pemilu Januari 2006 yang demokratis dan dimenangi oleh Hamas.

Tentang pemerintahan darurat, Hamas berpendapat bahwa UUD Palestina sudah jelas menentukan mekanisme pembentukan pemerintahan, jika membentuk pemerintahan yang tidak sesuai UUD tersebut, pemilu tersebut tidak sah dan merupakan aksi kudeta terhadap konstitusi dan hasil pemilu yang demokratis, dan di dalam UUD Palestina tidak ada dengan apa yang disebut pemerintahan darurat atau pemerintahan pelaksana dalam keadaan darurat. Selain itu, parlemen sebenarnya mempunyai hak setiap saat menggelar sidang, bukan harus menunggu 30 hari, untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap pemerintahan yang baru dibentuk. Namun parlemen saat ini tidak bisa menggelar sidang karena tidak memenuhi kuorum, karena 40 dari 76 anggota parlemen Hamas ditahan Israel, itulah konspirasi AS, Israel, dan Fatah untuk membuat keadaan politik Palestina macet dan wilayah Palestina diklaim dalam keadaan darurat.

Sementara itu, Pemerintah AS dan Israel yang selama ini berpihak kepada Fatah juga langsung mendukung Abbas secara penuh. AS dan Israel menyatakan akan mencabut embargo atas Tepi Barat untuk memperkuat Abbas. Israel juga menjanjikan akan mencairkan uang pajak milik Palestina yang mereka tahan³.

² *KOMPAS*, 20 JUNI 2007

³ *KOMPAS*, 20 JUNI 2007.

Pemerintahan baru Otoritas Palestina pimpinan Hamas bukan hanya diwarisi kas kosong dari pemerintahan sebelumnya tapi juga utang sebesar 1,7 miliar dollar AS. Kas kosong dan pembekuan bantuan dana oleh AS dan Eropa menyebabkan pemerintahan Hamas tidak bisa membayar gaji pegawai negeri. Kondisi keuangan Palestina diperparah karena Israel juga membekukan transfer dana sebesar 50 juta dolar AS per bulan dari hasil pajak dan cukai yang seharusnya menjadi hak Otoritas Palestina. Setiap bulannya, pemerintahan Palestina membutuhkan dana sebesar 170 juta dolar AS per bulan, 115 juta dolar AS di antaranya untuk keperluan membayar gaji pegawai negeri⁴.

Peluang Indonesia Dalam Konflik Tersebut

Beberapa saat yang lalu terdengar santer keinginan pemerintah untuk ikut berperan dalam penyelesaian konflik Palestina – Israel, bahkan Menlu Hassan Wirajuda bersama sejumlah tokoh seperti KH. Hasyim Muzadi telah melakukan sejumlah lawatan penjajakan, namun usaha tersebut akhirnya kandas karena terbentur pada ketiadaan hubungan diplomatic dengan Israel, untuk membuka hubungan diplomatic dengan Israel akan terlalu banyak resiko yang akan dihadapi pemerintah apabila dilakukan.

Sebenarnya tujuan tersebut mulia, namun saat ini belum saatnya untuk membuka hubungan diplomatic dengan Israel, apabila dipaksakan maka terlalu banyak resiko yang akan terjadi. Maka sebaiknya apabila ingin melakukan “sesuatu” untuk bangsa Palestina maka lebih baik pemerintah melakukan langkah yang tepat, logis dan rasional, mengingat kondisi internal Palestina saat ini yang tercerai berai karena terjadi sengketa antara Fatah dan Hamas maka hal tersebut sebenarnya adalah sebuah peluang bagi bangsa Indonesia. Mengapa sebuah peluang? Karena selama ini Indonesia tidak identik dengan salah satu faksi yang bertikai serta, dan Indonesia dianggap pihak yang netral, lain halnya dengan Negara-negara Arab yang cenderung condong di belakang Fatah, selain itu saat ini Indonesia adalah anggota tidak tetap DK PBB, serta Indonesia berpengalaman dalam masalah rekonsiliasi konflik.

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, komitmen masyarakat Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina tidak perlu diragukan lagi.

⁴ *Saatnya Muslim Sedunia Bantu Rakyat Palestina*. Suara Merdeka, Cyber News. www.yahoo.co.id. Diakses pada tanggal 11 Juli 2007

Dengan kenyataan-kenyataan diatas maka hampir dapat dipastikan bahwa dengan sedikit pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bertikai, maka mediasi untuk rekonsiliasi dapat dilakukan, dengan Indonesia sebagai mediator.

Adanya good will dari kedua pihak akan sangat membantu dalam proses rekonsiliasi, apabila dalam perjalannya nanti terjadi ketidak sesuaian antara kedua pihak yang bersifat prinsip maka hal tersebut adalah tantangan bagi Indonesia, dapat dipastikan Piagam Hamas 1988 nantinya akan menjadi batu sandungan dalam proses tersebut namun dengan pendekatan yang baik dengan memperlihatkan realitas saat ini maka bukan mustahil Hamas akan menurunkan aspirasinya dan merevisi piagam tersebut. Fatah dengan segala "kekotorannya" juga harus berbenah, saya yakin semua hal itu akan dapat terlaksana apabila kita serius mempersiapkannya dan adanya political maupun good will dari kedua pihak, serta kesadaran bahwa perjuangan tanpa persatuan adalah sia-sia.

REFERENSI

1. www.NewsVOA.com
2. KOMPAS, 13-25 Juni 2007
3. Harmiyati, Konflik Palestina-Israel, FISIP UPN " Veteran " Yogyakarta, 2005
4. Rais, Amin. Timur Tengah, UGM.
5. Abd. Rahman, Musthafa. Jejak-Jejak Juang Palestina Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa, KOMPAS,2002.
6. Abd. Rahman, Musthafa. Dilema Israel, Antara Krisi Politik Dan Perdamaian, KOMPAS, 2002.
7. Bandoro, Bantarto (Editor). Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru. CSIS, 1994